

ABSTRACT

Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is the basis of business competition policy in Indonesia which is binding on business actors to conduct fair business competition based on the substance of the law which consists of several aspects regulated therein and divided into parts. This section consists of articles including Article 1 point 5 of the law which defines a business actor as any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity that is established and domiciled or carries out activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either alone or together through agreements to carry out various business activities in the economic field. Meanwhile, there are foreign business actors who also play their role in business activities in Indonesia by owning shares in business entities in Indonesia which are business actors originating from outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia. Business according to Article 1 Number 5 of the law so that they can be bound. Therefore, this study was conducted to examine legal issues or legal issues arising from these legal issues and will be presented containing an analysis of whether Article 1 Number 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition can be applied to perpetrators. Foreign business that owns shares in a business entity in Indonesia.

The research method used is normative juridical because this research focuses on written sources. There are several approaches used in this research, namely the statutory approach because it reviews various statutory regulations related to the point of origin of legal problems that arise then a conceptual approach is carried out to research by looking at concepts related to legal issues and a case study approach is carried out to examine legal issues by looking at cases related to the legal issues being handled.

The results of this study indicate that the definition of business actor according to Article 1 Number 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition can be applied to foreign business actors who have shares in business entities in Indonesia by using the elements that make up the definition of perpetrators. The effort. The location of the problem in applying the definition of business actor to the article in the law lies in the sound of its overall formulation which gives rise to multiple interpretations so that extensive interpretation is used by reviewing the preamble to letter c of the law and the background of the formation of the law so that it can then be applied to foreign business actors. Who own shares in a business entity in Indonesia.

Keywords: Application of article, Business actor, Foreign business actor, Share ownership, Business entity

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia yang mengikat bagi pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha secara sehat berdasarkan substansi undang undang tersebut yang terdiri dari beberapa aspek yang diatur didalamnya dan dibagi menjadi bagian bagian terdiri dari pasal - pasal termasuk pasal 1 angka 5 undang undang tersebut yang mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Sementara itu, terdapat pelaku usaha asing yang turut memainkan perannya dalam kegiatan usaha di Indonesia dengan cara memiliki saham pada badan usaha di Indonesia yang merupakan pelaku usaha yang berasal dari luar wilayah hukum negara Republik Indonesia maka harus pula termasuk sebagai pelaku usaha yang sesuai dengan definisi pelaku usaha menurut pasal 1 Angka 5 undang undang tersebut agar dapat turut terikat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persoalan hukum atau isu hukum yang timbul atas permasalahan hukum tersebut dan akan dipaparkan berisi analisis mengenai apakah Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini terfokus pada sumber - sumber tertulis. Adapun beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang undangan karena meninjau pada berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan titik anjak permasalahan hukum yang timbul kemudian pendekatan konseptual dilakukan untuk meneliti dengan cara melihat konsep konsep yang terkait dengan isu hukum serta pendekatan studi kasus dilakukan untuk meneliti isu hukum dengan cara melihat kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia dengan menggunakan unsur unsur yang menyusun definisi pelaku usaha tersebut. Letak permasalahan dalam penerapan definisi pelaku usaha pada pasal dalam undang undang tersebut terletak pada bunyi rumusannya secara keseluruhan yang menimbulkan multitafsir sehingga penafsiran ekstensif digunakan dengan meninjau pada konsideran huruf c undang undang tersebut dan latar belakang pembentukan undang undang tersebut maka kemudian dapat diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

Kata Kunci : Penerapan pasal, Pelaku usaha, Pelaku usaha asing, Kepemilikan saham, Badan usaha